

MODEL PENTAHHELIX DALAM PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DI KABUPATEN SUKABUMI

Oleh:

Muhammad Rifki Habibie Nur Azmi¹, Tri Yuniningsih², Endang Larasati³

¹Mahasiswa Prodi S1 Administrasi Publik, FISIP, UNDIP

²Dosen Departemen Administrasi Publik, FISIP, UNDIP

³Dosen Departemen Administrasi Publik, FISIP, UNDIP

mrifki9a20142015@gmail.com, triyuniningsih26@gmail.com,
endanglarasatiprof57@gmail.com

Abstract. *The government is obliged to present a quality education to all its people without exception as a form or function of public service. In Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System (UU SISDIKNAS) stipulates that every Indonesian citizen has the right and obligation to obtain educational services through the government's Compulsory Schooling program for 12 years. But in fact, until now there are still many regions in Indonesia which are considered to have low quality education, one of the areas with low quality education is Sukabumi Regency. The Sukabumi Regency Government certainly cannot run alone without the support or cooperation of other parties. Various institutions must collaborate with each other to improve the quality of education, namely collaboration between the government, the private sector, academia, the community, and the media in an effort to improve the quality of education in the District. This study uses conclusions from planning theories originating from Blackman with a qualitative descriptive approach assisted by the use of ATLAS.ti software to analyze the research results. The data collection techniques used were observation, documentation, and interviews with key informants, namely the head of the administrative division of the Education Office of West Java Province region 5. The results showed that there were 5 actors involved in efforts to improve the quality of education in Sukabumi Regency, but collaborative efforts were still has not run optimally because there is no continuation of the program from secondary actors, so that in order for the efforts to be carried out to run effectively, the government feels the need to cooperate formally with secondary actors.*

Key Words: *Pentahelix, Colaboration, Education*

Abstrak. Pemerintah berkewajiban untuk menghadirkan suatu pendidikan yang berkualitas kepada seluruh masyarakatnya tanpa terkecuali sebagai salah satu bentuk atau fungsi pelayanan publik. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU SISDIKNAS) menetapkan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak serta kewajiban untuk mendapatkan pelayanan pendidikan melalui program Wajib Sekolah dari pemerintah selama 12 tahun. Namun pada kenyataannya sampai saat ini masih banyak daerah di Indonesia yang dinilai memiliki kualitas pendidikan yang masih rendah, salah satu wilayah dengan kualitas pendidikan yang masih rendah adalah Kabupaten Sukabumi. Pemerintah Kabupaten Sukabumi tentunya tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya dukungan atau kerjasama dengan pihak lain. Berbagai lembaga harus saling berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, yaitu kolaborasi antara pemerintah, swasta, akademisi, komunitas, dan media dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten. Penelitian ini menggunakan kesimpulan dari teori-teori perencanaan yang berasal dari Blackman dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang dibantu penggunaan software ATLAS.ti untuk menganalisis hasil penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan informan kunci yaitu kepala bidang tata usaha Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat wilayah 5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 5 aktor yang terlibat dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi, tetapi upaya kolaborasi masih belum berjalan maksimal karena tidak ada keberlanjutan program dari aktor sekunder, sehingga agar upaya yang dilakukan berjalan secara efektif, pemerintah dirasa perlu untuk melakukan kerjasama secara formal dengan aktor sekunder.

Kata Kunci: Pentahelix, Kolaborasi, Pendidikan

PENDAHULUAN

Pendidikan yang berkualitas merupakan suatu kebutuhan serta hak bagi seluruh masyarakat di Indonesia, oleh karena itu sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh undang-undang. Pendidikan yang berkualitas merupakan salah satu point dari 17 point Sustainable Development Goals (SDGs) yang disusun pada Forum PBB yang telah disepakati pada tanggal 2 Agustus 2015, tepatnya pada point nomor 4, yaitu Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua. Pendidikan dewasa ini merupakan hak mendasar di dalam nilai kehidupan manusia. Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting untuk menunjang kehidupan manusia karena pada dasarnya manusia dalam melaksanakan kehidupannya tidak lepas dari pendidikan, oleh karena itu pendidikan merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada suatu negara. Ditinjau dari nilai Indeks Pembangunan Manusia, Indonesia menempati posisi 110 dari 187 negara dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan angka 0,684. Dengan angka itu Indonesia masih tertinggal dari dua negara tetangga ASEAN yaitu Malaysia (peringkat 62) dan Singapura (peringkat 11). negara pemerintah berkewajiban untuk menghadirkan suatu pendidikan yang berkualitas kepada seluruh masyarakatnya tanpa terkecuali sebagai salah satu bentuk atau fungsi pelayanan publik. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU SISDIKNAS) menetapkan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak serta

kewajiban untuk mendapatkan pelayanan pendidikan melalui program Wajib Sekolah dari pemerintah selama 12 tahun mulai dari jenjang Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas/ sederajat. Demikian dengan apa yang tertera pada Peta Jalan Pendidikan (PJP) Indonesia yang diberlakukan oleh Kemendikbud, Wajib Sekolah yang dijamin oleh pemerintah kepada masyarakat adalah selama 12 tahun, artinya seluruh masyarakat Indonesia memiliki hak serta kewajiban untuk mendapatkan pelayanan pendidikan dari pemerintah hingga tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat. Perpanjangan durasi Wajib Belajar bagi seluruh masyarakat Indonesia menjadi 12 tahun ini juga akan dipertegas dalam revisi UU SISDIKNAS yang baru.

Namun pada kenyataannya sampai saat ini masih banyak daerah di Indonesia yang dinilai memiliki kualitas pendidikan yang masih rendah. Rendahnya kualitas pendidikan yang terjadi bisa disebabkan oleh dua faktor diantaranya adalah buruknya sistem pendidikan yang digunakan serta kurangnya infrastruktur penunjang pendidikan yang dimiliki sehingga belum mampu menjamin seluruh warganya untuk mendapatkan hak pendidikan yang sesuai dengan program Wajib Belajar hingga tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat. Salah satu daerah yang memiliki kualitas pendidikan yang masih tergolong rendah adalah Kabupaten Sukabumi. Menurut data yang diambil dari dinas pendidikan Provinsi Jawa Barat, kualitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi masih tergolong cukup rendah, hal ini dibuktikan dengan rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan SMA tahun 2019 di Kabupaten Sukabumi yang

hanya menyentuh angka sebesar 78,69 poin (3 besar terendah di Provinsi Jawa Barat), dari skor Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan SMA di Kabupaten Sukabumi juga masih menjadi salah satu yang terendah di Jawa Barat, pada tahun 2019 APM Kabupaten Sukabumi hanya menyentuh angka sebesar 50,65 poin. Nilai Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) ini merupakan salah satu indikator tercapainya pembangunan yang berkualitas dalam bidang pendidikan di suatu wilayah.

Selain pemerintah Kabupaten Sukabumi sebenarnya sudah banyak aktor-aktor dari berbagai kalangan yang telah memberikan peran serta upayanya dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi. Sebagai contoh upaya dari aktor swasta yang memberikan dana bantuan pendidikan untuk siswa putus sekolah dari PT. Semen SCG Sukabumi kepada pemerintah Kabupaten Sukabumi pada tahun 2018, namun upaya tersebut dinilai kurang efektif hal ini dibuktikan dengan masih rendahnya angka partisipasi murni dan kasar pendidikan di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2019, 2020, dan 2021. Karena pada dasarnya sesuai dengan UU SISDIKNAS yang menyatakan seluruh warga negara Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas secara gratis sehingga permasalahan buruknya angka partisipasi sekolah di Kabupaten Sukabumi bukan dikarenakan biaya pendidikan yang tidak terjangkau bagi sebagian masyarakat. Kurang efektifnya upaya yang dilakukan oleh PT. Semen SCG Sukabumi ini dikarenakan tidak ada kerjasama resmi antara pihak swasta dan

pemerintah sehingga dalam upaya yang dilakukan oleh masing-masing aktor tidak ada proses perencanaan, serta pengelolaan yang dilakukan oleh seluruh pihak yang terlibat.

Aktor dari kalangan masyarakat yang terjalin dalam wadah Yayasan juga sebenarnya sudah lama memberikan banyak upaya-upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi, salah satu upaya yang diberikan adalah dengan membuka sekolah-sekolah swasta di Kabupaten Sukabumi. Di Kabupaten Sukabumi sendiri jumlah sekolah tingkat menengah atas paling banyak berstatus sebagai sekolah swasta dengan lebih dari 200 sekolah dibandingkan dengan sekolah negeri yang hanya ada 26 sekolah, hal ini membuktikan bahwa masyarakat melalui Yayasan selaku Lembaga non-profit memainkan peran yang tidak kalah penting dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat sebagai salah satu haknya. Namun di Kabupaten Sukabumi sendiri mayoritas sekolah swasta yang ada berlokasi di wilayah-wilayah tertentu yang mendekati wilayah perkotaan atau daerah urban seperti Kecamatan Cisaat, Kecamatan Cibadak, dan Kecamatan Sukaraja sehingga masih banyak Kecamatan lain yang masih kekurangan jumlah sekolah, sebagai contoh Kecamatan Purabaya yang hanya memiliki 1 sekolah Swasta dan tidak ada satu pun sekolah negeri jenjang SMA di Kecamatan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi yang berjalan antara pemerintah dengan pihak Yayasan juga belum terjalin dengan baik, padahal dengan tingkat partisipasi masyarakat melalui Yayasan yang cukup tinggi dalam sektor pendidikan bila disertai dengan komunikasi serta

perencanaan dalam ikatan kerjasama dengan pemerintah, pemerintah dapat menjadikan peran dari Yayasan sebagai salah satu solusi untuk mewujudkan pemerataan pendidikan di Kabupaten Sukabumi.

Adapun masalah-masalah yang dihadapi oleh aktor-aktor tersebut dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi diantaranya adalah masih kurangnya sumber daya pengajar baik dari segi kualitas maupun kuantitas serta infrastruktur penunjang pendidikan yang belum memadai untuk melakukan kegiatan belajar mengajar secara ideal Pemerintah Kabupaten Sukabumi tentunya memerlukan bantuan dari aktor-aktor lain yang tergabung kedalam kolaborasi model helix dalam menjawab permasalahan-permasalahan tersebut. Namun upaya peningkatan kualitas pendidikan yang dilakukan oleh masing-masing aktor pun belum memiliki ikatan koordinasi yang baik sehingga pada pelaksanaannya setiap aktor selalu menghadapi hambatan-hambatan yang sulit dihadapi sendiri dalam upayanya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi. Oleh karenanya belum ada pembagian peran yang jelas yang melibatkan para aktor terkait peran apa yang dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi. Maka dari itu dengan menggunakan kolaborasi model helix diharapkan dapat membangun koordinasi serta relasi yang baik diantara para aktor yang berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi. Model helix tidak hanya memberikan konsep kolaborasi namun juga memperjelas tugas, fungsi dan kewajiban dari setiap aktor yang terkait agar relasi yang terjalin dalam upaya untuk

meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi dapat berjalan secara maksimal dan efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengambilan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tempat yang dipilih sebagai lokasi pada penelitian adalah di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Peneliti menggunakan informan penelitian sebagai sumber informasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini, yaitu:

Kepala Sub-Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wilayah 5, dan Kepala LPPM Universitas Muhammadiyah Sukabumi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam upaya kolaborasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi aktor-aktor yang terlibat memiliki perannya masing-masing. Blackman (2003: 23) menyatakan bahwa aktor-aktor yang terlibat dalam kolaborasi dibedakan menjadi aktor primer dan aktor sekunder. Hal tersebut dilihat dari tingkat ketertarikannya, serta bagaimana pengaruh dari ketertarikan itu dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi. Aktor yang dimaksud sebagai aktor primer adalah aktor yang selalu ada pada setiap tahap pengembangan program, dapat berjumlah satu atau lebih. Sedangkan aktor sekunder adalah aktor yang mempengaruhi namun tidak ikut dalam setiap tahapan program serta tidak banyak memiliki kepentingan.

Aktor primer diantaranya; Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wilayah 5 selalu terlibat dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi. Hal ini dikarenakan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pendidikan memang merupakan tugas dan fungsi dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wilayah 5. Dari segi tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wilayah 5 memiliki 4 tugas pokok yaitu sebagai koordinator dan pelaksanaan kebijakan dan program di bidang pendidikan di daerah Kota dan Kabupaten Sukabumi, koordinator serta pelaksana evaluasi dan pelaporan program serta kegiatan pendidikan di daerah Kota dan Kabupaten Sukabumi, koordinator serta pelaksana pendidikan di daerah Kota dan Kabupaten Sukabumi, serta pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan yang telah diarahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat; Yayasan memiliki kepentingan bahkan kewajiban dalam meningkatkan kualitas masyarakat terutama melalui bidang pendidikan, karena secara aturan berdirinya suatu Yayasan utamanya di Kabupaten Sukabumi harus turut serta membantu pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi dalam upaya pembangunan masyarakat terutama dalam bidang pendidikan; Universitas Muhammadiyah Sukabumi sebagai salah satu perguruan tinggi di Sukabumi tentu saja memiliki kewajiban untuk turut serta membantu pemerintah dalam hal pengembangan serta penelitian khususnya di bidang pendidikan, hal tersebut telah menjadi kewajiban bagi seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia tidak terkecuali karena merupakan salah satu dari tiga point yang terkandung dalam Tridharma perguruan tinggi.

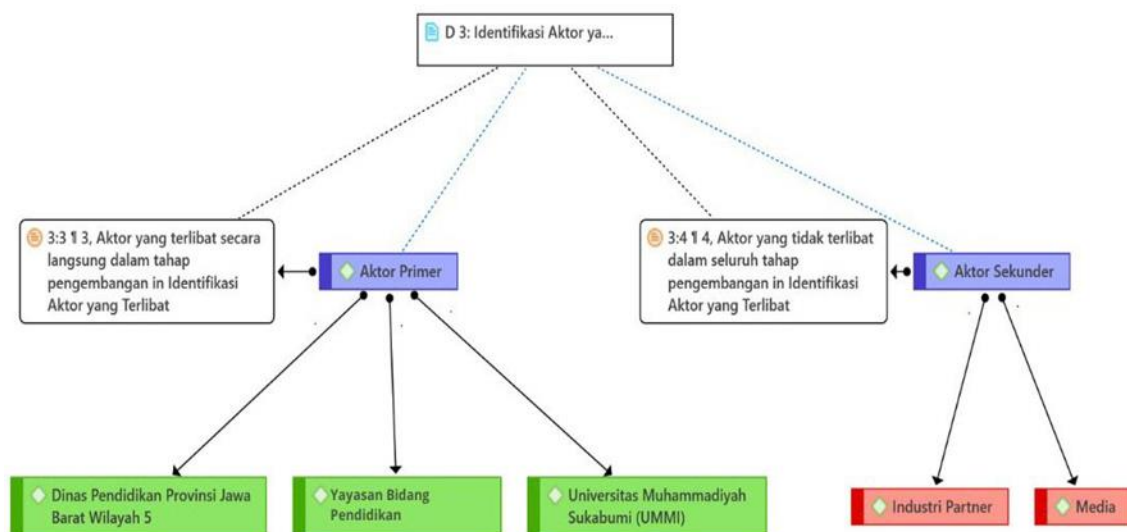
Universitas Muhammadiyah Sukabumi telah sejak lama melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, banyak akademisi Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang selalu dilibatkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi baik itu dalam agenda pengabdian ataupun pelatihan.

Sementara untuk aktor sekunder diantaranya; Industri partner. Terdapat banyak badan usaha yang berlokasi di Kabupaten Sukabumi, baik perusahaan nasional maupun internasional. Banyaknya perusahaan yang berlokasi di Kabupaten Sukabumi ini seharusnya memberikan keuntungan bagi sektor pendidikan di Kabupaten Sukabumi. Sejatinya perusahaan-perusahaan di Kabupaten Sukabumi kebanyakan memperkerjakan masyarakat lokal Kabupaten Sukabumi, sehingga perusahaan pun melalui pemberian dana CSR seharusnya turut serta ikut berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah Kabupaten Sukabumi agar mampu menghasilkan sumber daya manusia yang jauh lebih berkualitas dan mampu bersaing secara global. Meskipun pada tahun 2018 PT Semen SCG pernah memberikan dana hibah untuk pengembangan pendidikan kepada pemerintah Kabupaten Sukabumi, namun sejak wewenang pelayanan di bidang pendidikan tingkat menengah atas di Kabupaten Sukabumi telah dialihkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi pada tahun 2020 serta diberlakukannya kebijakan sekolah gratis hingga tingkat SMA / Sederajat, serta Ada beberapa pabrik terutama pabrik otomotif yang telah menjalin kerjasama dengan beberapa SMK di

Kabupaten Sukabumi perihal pelatihan keterampilan siswa. Namun belum ada kerja sama secara formal antara Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wilayah 5 dengan pihak perusahaan swasta; Media massa sebagai sarana sosialisasi dan komunikasi kebijakan, serta sebagai link penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Namun sejauh ini belum ada kerja sama secara formal antara

5 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wilayah 5 media yang ada di kabupaten Sukabumi. Pihak media dengan pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wilayah 5 sendiri sebenarnya sering melakukan pertukaran informasi perihal masalah-masalah pendidikan di Kota dan Kabupaten Sukabumi.

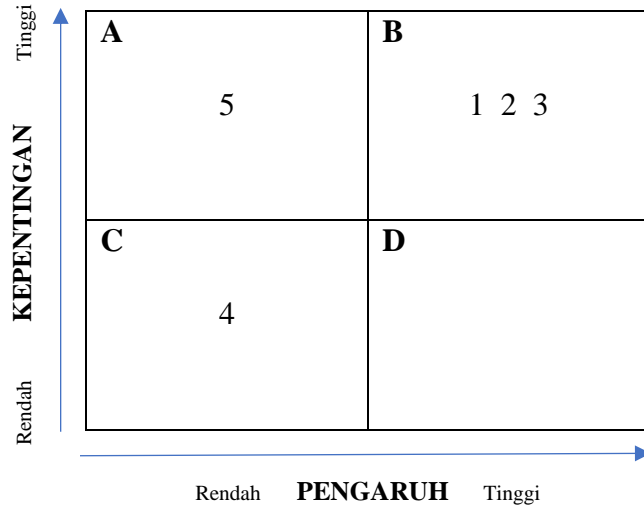
Bagan Identifikasi Aktor



Sumber: Dari Penulis diolah menggunakan *Software* Atlas.ti berdasarkan data dari hasil penelitian, 2023

Kolaborasi dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi pada prosesnya melibatkan sejumlah aktor. Aktor tersebut memiliki peran masing-masing sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Bryson (2004) mengatakan bahwa pengaruh dan kepentingan aktor digunakan untuk melihat dimana aktor ditempatkan dan bagaimana pengaruh serta kepentingan mereka. Indikator tersebut digunakan untuk melihat kemampuan aktor-aktor tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Berikut ini merupakan gambar pengaruh dan kepentingan aktor dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi.

Pengaruh dan Kepentingan Aktor



Sumber: Diambil dari Blackman (2003), Diolah oleh Penulis berdasarkan data dari hasil penelitian, 2023

Keterangan:

1. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wilayah 5
2. Yayasan Bidang Pendidikan
3. Universitas Muhammadiyah Sukabumi
4. Industri Partner
5. Media masa

Menurut Blackman (2003: 24-25), Aktor dibagi kedalam empat Kohesi, yaitu kohesi A, B, C, D, dimana setiap aktor yang berada didalamnya memiliki peran yang berbeda-beda. Kohesi A berisi aktor dengan kepentingan yang tinggi dan pengaruh yang rendah. Kohesi B diisi oleh aktor yang memiliki kepentingan dan pengaruh yang sama-sama tinggi. Kohesi C berisi aktor dengan kepentingan yang rendah namun memiliki pengaruh yang tinggi. Kemudian yang terakhir kohesi D adalah aktor yang

memiliki kepentingan dan pengaruh yang rendah.

KOHESI A: Kohesi ini menunjukkan bahwa aktor yang ada didalamnya berarti memiliki kepentingan yang tinggi namun memiliki pengaruh yang rendah. Aktor yang berada pada kohesi A dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi adalah media. Media memiliki kepentingan dalam mengelola informasi serta mempublikasi segala informasi tersebut terutama yang berhubungan dengan sektor pendidikan. Informasi yang dipublikasi oleh media masa sebenarnya merupakan salah satu komponen penting dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi, namun dikarenakan belum adanya kolaborasi secara formal antara media mas dengan instansi terkait yang bertanggung jawab secara langsung dalam upaya peningkatan kualitas

pendidikan di Kabupaten Sukabumi, penyaluran informasi yang dimiliki oleh media masa sering kali tidak berjalan efektif sehingga tidak ada tindak lanjut yang diberikan oleh instansi terkait perihal informasi tersebut.

KOHESI B: Aktor dalam kohesi B adalah aktor yang memiliki kepentingan serta pengaruh yang tinggi dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi. Dalam penelitian ini terdapat 3 aktor yang menempati kohesi ini, yaitu Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wilayah 5, Yayasan Bidang Pendidikan, dan Universitas Muhammadiyah Sukabumi.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wilayah 5 tentunya memiliki kepentingan yang tinggi dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi, hal tersebut bukan hanya merupakan tugas dan fungsi dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wilayah 5 melainkan juga merupakan tanggung jawab Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wilayah 5 selaku instansi pemerintahan yang berkewajiban memberikan pelayanan di bidang pendidikan yang berkualitas kepada masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Sukabumi. Adapun Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wilayah 5 selaku koordinator serta pihak yang

memfasilitasi aktor-aktor lain yang memiliki ketertarikan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi sehingga Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wilayah 5 memiliki pengaruh yang tinggi dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi.

Yayasan memiliki kepentingan yang tinggi dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi. Tujuan dari dibentuknya Yayasan sendiri adalah untuk mencetak masyarakat yang unggul dari segi akhlak serta pengetahuan dan keterampilan, oleh karena itu sektor pendidikan yang berkualitas menjadi sangat penting untuk menunjang serta mewujudkan tujuan dari Yayasan di Kabupaten Sukabumi. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Yayasan bidang pendidikan di Kabupaten Sukabumi adalah melakukan pemerataan infrastruktur pendidikan dengan mengelola serta membangun sekolah-sekolah di daerah yang minim atau bahkan belum memiliki sekolah sehingga menambah keterjangkauan pelayanan pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi. Upaya tersebut sangatlah penting mengingat salah satu penyebab masih rendahnya kualitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi adalah minimnya fasilitas sekolah terutama pada jenjang menengah atas sehingga

menyebabkan pelayanan di bidang pendidikan yang sulit dijangkau oleh seluruh masyarakat Kabupaten Sukabumi, dengan demikian Yayasan bidang pendidikan memiliki pengaruh yang tinggi dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi.

Universitas Muhammadiyah Sukabumi selaku salah satu perguruan tinggi di Sukabumi tentunya terikat pada kewajiban untuk turut serta membantu pemerintah dalam hal pengembangan serta penelitian khususnya di bidang pendidikan, hal tersebut telah menjadi kewajiban bagi seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia tidak terkecuali karena merupakan salah satu dari tiga point yang terkandung dalam Tridharma perguruan tinggi, sehingga dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi Universitas Muhammadiyah Sukabumi memiliki kepentingan yang tinggi.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi memiliki peran sebagai pihak utama yang memberikan pelatihan serta pengembangan kepada setiap tenaga pengajar yang ada di Kabupaten Sukabumi, selain itu beberapa akademisi dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi juga ditunjuk serta dilatih

langsung oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset Teknologi sebagai pengawas, pembina, serta pihak yang berwenang untuk mengevaluasi guru, sekolah, pengawas sekolah, serta kepala sekolah di wilayah Kabupaten Sukabumi, dengan demikian Universitas Muhammadiyah Sukabumi memiliki pengaruh yang tinggi dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi.

KOHESI C: Kohesi C berisikan aktor-aktor yang memiliki kepentingan yang rendah namun memiliki pengaruh yang tinggi dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi. Tidak ada aktor yang termasuk kedalam kohesi C dalam penelitian ini.

KOHESI D: Aktor yang termasuk kedalam kohesi D adalah aktor yang memiliki baik kepentingan serta pengaruh yang rendah dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi. Pada penelitian ini aktor yang termasuk kedalam kohesi D adalah industri partner. Aktor industri sebenarnya dapat melakukan peranan penting dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi dengan cara memanfaatkan dana CSR sebagai sumber dana untuk membangun fasilitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi

yang masih kurang terjangkau bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sukabumi. Namun tidak ada kewajiban ataupun peraturan khususnya di daerah Kabupaten Sukabumi yang mewajibkan perusahaan yang ada di Kabupaten Sukabumi untuk melakukan hal tersebut sehingga pada hal ini industry partner yang ada di Kabupaten Sukabumi meskipun memiliki ketertarikan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi, industry partner memiliki kepentingan yang rendah.

Meskipun memiliki kepentingan yang rendah ada beberapa upaya yang telah dilakukan oleh industry partner dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi diantaranya adalah pemberian dana hibah pendidikan pada tahun 2018 oleh PT Semen SCG Sukabumi kepada pemerintah Kabupaten Sukabumi serta Honda Otomotif Sukabumi yang menyediakan tempat kerja praktik serta magang oleh beberapa perusahaan dan pabrik otomotif bagi siswa SMK. Namun dikarenakan belum adanya kolaborasi ataupun kerja sama yang terjalin secara formal serta resmi antara industry partner dengan pihak pemerintah, tidak ada keberlanjutan dari upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak industry partner sehingga pada penelitian ini industry partner

memiliki pengaruh yang rendah dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi.

Peran masing-masing aktor dilihat berdasarkan kontribusi yang telah dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi. Blackman (2003) menyebutkan bahwa tingkat terendah dalam suatu program peningkatan adalah informan, dimana pada peran ini menjadikan aktor sebagai sumber informasi dalam setiap tahapan peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi. Kemudian diatas peran informan terdapat peran konsultan, dimana pada jenis peran ini menjadikan aktor terkait sebagai pihak yang dapat dijadikan sebagai pemberi masukan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi. Tingkat peran berikutnya adalah kerjasama, dimana pada tingkatan ini mewajibkan semua aktor yang ada untung saling bekerjasama untuk membagikan setiap sumber daya yang mereka punya untuk membantu keberhasilan pelaksanaan program. Tingkat peran yang keempat dan terakhir adalah kontrol, dimana pada tahapan ini aktor melakukan perannya untuk mengawasi serta mengontrol jalannya program dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi agar sesuai dengan perencanaan serta tujuannya.

Tabel Identifikasi Peran Aktor

NO	Aktor	Jenis Peran			
		Informan	Konsultan	Kerjasama	Kontrol
1	Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wilayah 5	V	V	V	V
2	Yayasan Bidang Pendidikan	V	V	V	-
3	Universitas Muhammadiyah Sukabumi	V	V	V	V
4	Industri Partner	-	-	V	-
5	Media Masa	V	-	-	-

Sumber: Diolah oleh penulis dari hasil penelitian, 2023

Berdasarkan table aktor yang terlibat serta jenis perannya dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi pada tahapan Informan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wilayah 5, Yayasan Adzkie Damari Sukabumi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, dan Media Masa; peran konsultan diperankan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wilayah 5, Yayasan Adzkie Damari Sukabumi, dan Universitas Muhammadiyah Sukabumi; kemudian peran kerjasama diantaranya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wilayah 5, Yayasan Adzkie Damari Sukabumi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, dan Industri Partner: terakhir untuk aktor yang berperan sebagai kontrol hanya diperankan oleh dua aktor yakni Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wilayah 5, dan Universitas Muhammadiyah Sukabumi.

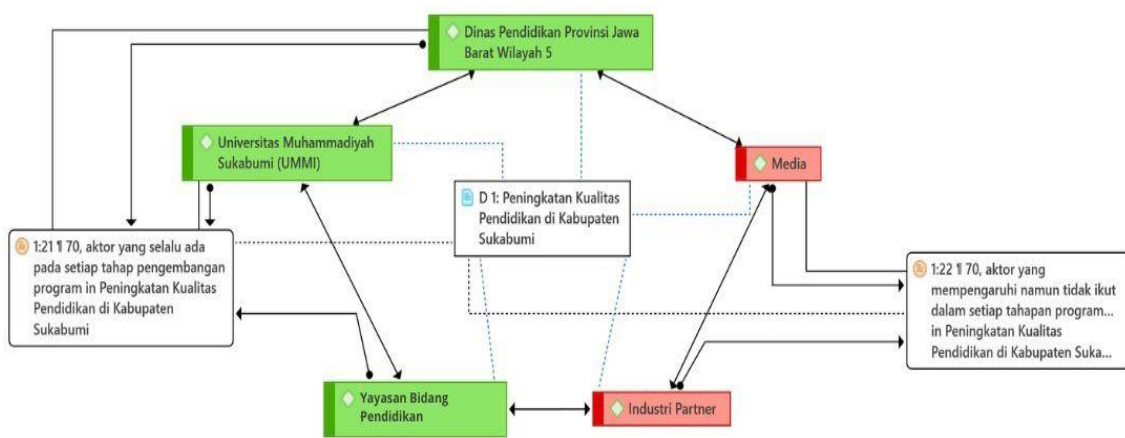
Secara garis besar terdapat tiga faktor yang menyebabkan kurang baiknya kualitas pendidikan di Kabupaten sukabumi, faktor tersebut diantaranya, (1) Kurangnya fasilitas penunjang pendidikan terutama jumlah sekolah di Kabupaten Sukabumi, (2) Kurangnya kualitas SDM tenaga pengajar, (3) serta kuantitas SDM tenaga pengajar di Kabupaten Sukabumi. Untuk membenahi permasalahan dari segi infrastruktur Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wilayah 5 melakukan fokus kerjasama dengan pihak Yayasan yang bergerak di sektor pendidikan di Kabupaten Sukabumi. Langkah yang diambil guna menyelesaikan permasalahan tersebut adalah pihak Yayasan mengelola serta membangun sekolah-sekolah baru utamanya di wilayah kecamatan yang minim fasilitas pendidikan. Kemudian untuk permasalahan kurangnya kualitas serta kuantitas SDM tenaga pengajar di Kabupaten Sukabumi, pihak Dinas Pendidikan Provinsi

Jawa Barat bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Sukabumi untuk meningkatkan kualitas serta kuantitas tenaga pengajar di Sukabumi melalui program pelatihan, pendidikan serta program beasiswa.

Selain Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Yayasan, dan Universitas Muhammadiyah Sukabumi terdapat dua aktor lain yang juga turut memberikan kontribusinya dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi meskipun kedua aktor tersebut tidak terlibat secara langsung ataupun memiliki hubungan kerjasama secara resmi dengan aktor utama

atau Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wilayah 5, kedua aktor tersebut adalah industri partner yang telah menghibahkan dana pendidikan kepada pemerintah Kabupaten Sukabumi oleh PT Semen SCG Sukabumi serta penyediaan lapangan kerja praktik dan magang untuk siswa SMK oleh perusahaan Honda Otomotif Sukabumi, dan yang kedua ada media yang berperan sebagai pihak yang selalu mencari, menganalisis, serta mempublikasi informasi-informasi seputar pendidikan yang bisa saja berguna bagi pihak atau aktr-aktor utama dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi.

Jaringan Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kabupaten Sukabumi



Sumber: Diolah oleh penulis menggunakan Software Atlas.ti Berdasarkan data hasil penelitian, 2023

Secara keseluruhan berdasarkan analisis penulis menggunakan Software Atlas.ti berdasarkan bagan diatas, dalam penelitian ini terdapat 5 aktor yang terdiri dari aktor sekunder dan aktor primer diantaranya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wilayah 5, Yayasan Adzkiya Damari

Sukabumi, dan Universitas Muhammadiyah Sukabumi untuk aktor primer serta industri partner dan media masa sebagai aktor sekunder. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang terbentuk dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di

Kabupaten Sukabumi adalah kolaborasi model Pentha Helix.

SIMPULAN

Secara garis besar terdapat tiga faktor yang menyebabkan kurang baiknya kualitas pendidikan di Kabupaten sukabumi, faktor tersebut diantaranya, (1) Kurangnya fasilitas penunjang pendidikan terutama jumlah sekolah di Kabupaten Sukabumi, (2) Kurangnya kualitas SDM tenaga pengajar, (3) serta kuantitas SDM tenaga pengajar di Kabupaten Sukabumi. Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi, pemerintah tentunya tidak mampu bila harus bekerja sendiri sehingga pemerintah melakukan kolaborasi dengan aktor lain yang terdiri dari 5 aktor yang berperan dalam pengembangan kualitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi yaitu; Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wilayah 5, Yayasan, dan Universitas Muhammadiyah Sukabumi sebagai aktor primer, serta; industri partner, dan media masa sebagai aktor sekunder.

Adapun peran yang dilakukan oleh masing-masing aktor dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kabuaten Sukabumi berdasarkan jenis perannya

diantaranya: Pada peran Informan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wilayah 5, Yayasan, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, dan Media Masa; peran konsultan diperankan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wilayah 5, Yayasan, dan Universitas Muhammadiyah Sukabumi; kemudian peran kerjasama diantaranya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wilayah 5, Yayasan, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, dan Industri Partner: terakhir untuk aktor yang berperan sebagai kontrol hanya diperankan oleh dua aktor yakni Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wilayah 5, dan Universitas Muhammadiyah Sukabumi.

Secara keseluruhan dalam penelitian ini terdapat 5 aktor yang terdiri dari aktor sekunder dan aktor primer diantaranya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wilayah 5, Yayasan bidang pendidikan, dan Universitas Muhammadiyah Sukabumi untuk aktor primer serta industri partner dan media masa sebagai aktor sekunder. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang terbentuk dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi adalah kolaborasi model Pentha Helix.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dwi, Bernadin (2020). *Jurus Pentahelix Menguatkan Kinerja UMKM Dimasa Pandemi Covid-19*. Deepublish. UPN Veteran Jakarta.
- Dwiyanto, Agus (2015). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada Press.
- Hasbullah, M. (2015). *Kebijakan Pendidikan: Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Keban, Y. T. (2008). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sabarudin, Abdul (2015). *Manajemen Kolaborasi Dalam Pelyanan Publik*. Jakarta : Graha Ilmu.

- Saleh, Chairul (2020). *Kolaborasi Pemerintahan*. Universitas Terbuka.
- Sinambela, Poltak (2013). *Kinerja Pegawai : Teori, Pengukuran dan Implikasi*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2010). *Memahami Penelitian Kualitatif, Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Tadjudin, Djuhendi (2000). *Manajemen Kolaborasi*. Lembaga Alam Tropika Indonesia.

Jurnal

- Ahmad Wahyudi, Achmad Lutfi (2019). Analisis Reformasi Pendidikan dalam Mewujudkan Pemerataan Kualitas Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*. Volume 9 No. 2.
- Aribowo, H., Alexander W., Yudithia D.P. Implementasi Kolaborasi Model Pentahelix Dalam Rangka Mengembangkan Potensi Pariwisata Di Jawa Timur Serta Meningkatkan Perekonomian Domestik. *Jurnal Mebis, Manajemen dan Bisnis*.
- Aziz, Amrullah (2015). Peningkatan Mutu Pendidikan. *Jurnal Studi Islam*. Volume 10 No. 2 (2015): Pancawahana.
- Das, Koushik (2019). The Role and Impact of ICT in Improving the Quality of Education: An Overview. *International Journal of Innovative Studies in Sociology and Humanities (IJISSH)*.
- Haryati, Sri. 2012. "Pengembangan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah dan Madrasah melalui Proses Akreditasi". *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora*. Volume 12 No. 3.
- Kassandra Birchler, Katharina Michaelowa (2016). Making aid work for education in developing countries: An analysis of aid effectiveness for primary education coverage and quality. *International Journal of Educational Development*. Volume 45 halaman 37-52.
- Serena Masino, Miguel Nino-Zarazua (2016). What works to improve the quality of student learning in developing countries?. *International Journal of Educational Development*. Volume 48 halaman 53-65.
- Suryana S (2020). Permasalahan mutu pendidikan dalam perspektif pembangunan pendidikan. *Jurnal UNNES*, 84-93.
- Yuyun Elizabeth Patras, Agus Iqbal, Papat, Yulia Rahman (2019). Meningkatkan Kualitas Pendidikan Melalui Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah dan Tantangannya. *Jurnal Manajemen Pendidikan*.